



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Pengantar**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan penjelasan mengenai teori – teori yang mendukung dan hal – hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti seperti tanggung jawab sosial perusahaan, nilai perusahaan, kinerja keuangan, dan mekanisme tata kelola perusahaan. Bab ini terdiri dari lima sub bab antara lain landasan teoritis, variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diteliti.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tanggung jawab sosial perusahaan, nilai perusahaan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan independensi komite audit.

**A. Landasan Teoritis**

**1. Stakeholder Theory**

Dalam buku *Strategic Management : A Stakeholder Approach* (1984) karya R. Edward Freeman (dalam Elijidoten 2004) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Dalam buku tersebut teori *Stakeholder* diartikan sebagai sebuah teori manajemen organisasi dan etika bisnis yang membahas moral dan nilai – nilai dalam mengelola sebuah organisasi. Terdapat banyak *stakeholder* di dalam suatu organisasi antara lain seperti karyawan, masyarakat, negara, *supplier*, pasar modal, pesaing, badan industri, pemerintah asing dan lain - lain.



Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan

oleh para *stakeholder*. Dalam hal ini, pengungkapan sosial harus dianggap sebagai wujud dialog antara manajemen dengan *stakeholder* (Indrawati, 2009) karena kesuksesan suatu perusahaan dapat dilihat dari kesuksesan manajemen menjalin hubungan yang baik dengan *stakeholder*-nya.

Teori *stakeholder* menurut Ullman (dalam Elijidoten 2004) dibagi menjadi tiga dimensi yaitu *stakeholder power*, *strategic posture* dan *economic performance*. Ketiga hal tersebut merupakan kerangka dalam memprediksi aktivitas sosial perusahaan. Perusahaan menggunakan pengungkapan sosial sebagai sarana untuk mengelola hubungan mereka dengan para *stakeholder* dan dengan lingkungan eksternal, hal itulah yang menjadi prinsip utama dalam teori *stakeholder*.

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial berperan penting bagi perusahaan karena kehidupan perusahaan berlangsung di tengah lingkungan masyarakat, sehingga kemungkinan kegiatan operasionalnya berdampak bagi lingkungan dan sosial sangatlah besar. Apabila dapat diterapkan dengan baik maka kinerja perusahaan pun akan semakin meningkat. Kristi (2013) menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan para *stakeholder* telah memberikan kepercayaannya kepada perusahaan dan akan memberikan dukungan atas segala tindakan yang dilakukan perusahaan selama tidak melanggar hukum, karena *stakeholder* menganggap perusahaan yang menjalankan CSR merupakan perusahaan yang peduli akan masalah lingkungan dan sosial. Perusahaan diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi didasari oleh definisi kontrak sosial yang terjadi diantara institusi sosial dengan masyarakat (Nurkhin, 2010). Dengan teori legitimasi, perusahaan berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas dan kinerjanya baik. Perusahaan menggunakan laporan tahunan yang di dalamnya berisi informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Dengan penerimaan tersebut menurut Kiroyan (dalam Sayekti dan Wondabio 2007) diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan kekuatan keuangan menjadi lebih maksimal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, teori legitimasi dijadikan sebagai salah satu teori yang mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk memperoleh nilai positif dan legitimasi dari masyarakat.

Teori ini berkaitan pula dengan rasio likuiditas perusahaan yang berkeyakinan bahwa kuat lemahnya kemampuan finansial perusahaan ditunjukkan dari rasio likuiditasnya, karena rasio likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi pula. Hal tersebut didasarkan bahwa perusahaan yang memiliki finansial yang kuat maka cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan dengan kemampuan finansial yang lemah.

## 3. *Agency Theory*

Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana seseorang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Di dalam suatu perusahaan hubungan antara manajer perusahaan dengan

para pemegang saham dipandang sebagai suatu kontrak. Pemegang saham (prinsipal) menyerahkan perusahaannya untuk dikelola oleh pihak manajemen. Manajemen sebagai pihak yang memperoleh wewenang berkewajiban untuk menyediakan laporan keuangan yang cenderung memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan dan prospek perusahaan dibandingkan para pemegang saham. Sebagai wujud dari tanggung atas pengelolaan perusahaan, manajemen berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi yang terjadi di perusahaan kepada para pemegang saham. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga hal ini memicu terjadinya konflik keagenan atau dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*).

Menurut Haruman (2008) timbulnya konflik diantara manajer dengan pemegang saham atau yang biasa disebut masalah keagenan dapat diminimalkan dengan melakukan pengawasan agar dapat mensejajarkan kepentingan - kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan (*agency cost*) dan untuk mengurangi *agency cost*, ada beberapa alternatif seperti adanya kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusi.

#### 4 Perusahaan *High Profile*

Utomo (dalam Titisari *et al.* 2010) mendefinisikan industri *high profile* adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, resiko politis yang tinggi atau menghadapi kompensasi yang tinggi. Perusahaan yang dikategorikan dalam industri *high profile* antara lain seperti agribisnis, kehutanan, dan perikanan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



otomotif; industri kimia; makanan dan minuman; hotel dan travel; pertambangan; kertas; tembakau; transportasi; serta telekomunikasi.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan pertambangan karena perusahaan pertambangan termasuk dalam industri *high profile*. Industri *high profile* pada umumnya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat menjadi lebih sensitif dikarenakan apabila terjadi kelalaian dari perusahaan dalam pengamanan proses produksi dan hasilnya dapat berdampak fatal bagi masyarakat.

Perusahaan yang dikategorikan sebagai industri *high profile*, dirasakan perlu untuk menerapkan pengungkapan sosial yang lebih luas dengan tujuan untuk menciptakan penilaian yang positif terhadap kinerja perusahaan (Nahar, dalam Titisari *et al.* 2010).

## 5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

### a. Pengertian

Berikut ini adalah berbagai pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang peneliti kutip dari berbagai sumber:

ISO : 26000 tanggung jawab sosial perusahaan merupakan :

“Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.”

CSR Forum mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan adalah :

“Bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut *The World Business Council for Sustainable Development*, tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dari komunitas setempat atau pun masyarakat luas. Hal tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Menurut *The European Commission* tanggung jawab sosial adalah suatu tanggung jawab perusahaan terhadap pengaruhnya kepada masyarakat. Komisi tersebut mendorong perusahaan untuk bisa menggabungkan sosial, lingkungan, hak asasi manusia dan perhatian terhadap konsumen ke dalam operasi bisnisnya dan menjadikan strategi utama untuk dapat lebih dekat dengan para *stakeholder*.

Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan dalam bentuk tanggung jawab di bidang ekonomi, lingkungan, sosial, tenaga kerja dan juga produk yang dihasilkannya agar

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak merugikan *stakeholder* melainkan membawa banyak keuntungan atau manfaat bagi *stakeholder*.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**b. Tujuan Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Selain itu dapat berfungsi pula sebagai sarana untuk meningkatkan citra perusahaan bagi publik, termasuk investor dan menjadi bagian dari strategi bisnis dan pengelolaan risiko perusahaan. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan secara konsisten akan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis.

Adapun tujuan dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Dewi dan Widagdo (2012) antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan dan mempertahankan citra perusahaan
- 2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap masyarakat
- 3) Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

**6 Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan**

Menurut Hendriksen (dalam Nurlala dan Islahuddin 2008) menyatakan bahwa pengungkapan (*disclosure*) adalah penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) dan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Pengungkapan wajib (*mandatory*) merupakan pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan pengungkapan sukarela (*voluntary*) merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengungkapan informasi tambahan dari perusahaan.

Peraturan mengenai pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang - Undang No.40 tahun 2007 Pasal 66 ayat 2c. Di dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-134/BL/2006 juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan dimana di dalamnya juga termasuk uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan. Sedangkan dalam standar akuntansi Indonesia, penyajian informasi lingkungan juga telah dianjurkan dalam PSAK No.1 (Revisi 2009) Paragraf kedua belas :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) tersebut menunjukkan bahwa perusahaan - perusahaan di Indonesia diberikan kebebasan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

*Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)* menyatakan bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam suatu laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* merupakan suatu bentuk pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Dalam membuat suatu laporan keberlanjutan terdapat beberapa pedoman

yang digunakan untuk mengetahui pengungkapan apa saja yang akan dilaporkan.

Salah satu badan yang aktif mengeluarkan pedoman bagi perusahaan terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). Dalam standar GRI indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang mencakup tenaga kerja dan lingkungan kerja, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk.

## 7. *Global Reporting Initiative* (GRI)

*Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan sebuah organisasi nirlaba yang menyusun standar pelaporan non keuangan internasional yang dapat digunakan secara sukarela oleh organisasi yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial serta berkomitmen untuk terus - menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia.

Tiga fokus pengungkapan GRI, antara lain :

1. Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*)
2. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*)
3. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*) yang terdiri dari :
  - Tenaga Kerja (*labor practices and decent work*)
  - Hak Asasi Manusia (*human rights performance*)
  - Sosial (*society*)
  - Tanggung jawab Produk (*product responsibility performance*)

GRI yang berkedudukan di Belanda membuat pedoman pelaporan keberlanjutan sejak tahun 2000 dan hingga kini pedoman tersebut terus disempurnakan hingga pada 22 Mei 2013 diluncurkan standar pelaporan terbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu G4 yang di dalamnya membahas mengenai persyaratan data berkelanjutan,

dan memungkinkan organisasi untuk memberikan informasi yang relevan untuk berbagai kelompok *stakeholder*. Penelitian ini menggunakan pedoman GRI G3 karena merupakan salah satu pedoman yang paling sering digunakan oleh perusahaan – perusahaan yang ada di Indonesia.

**a. Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI G3**

**Tabel 2.1**

Indikator	Aspek	Kode	Keterangan	
Kinerja Ekonomi	Kinerja Ekonomi	EC1	Perolehan dan distribusi ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyanggah dana serta pemerintah.	
		EC2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.	
		EC3	Cakupan kewajiban organisasi terhadap program manfaat pasti.	
		EC4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.	
		Keberadaan Pasar	EC5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada daerah operasi utama, berdasarkan jenis kelamin.
			EC6	Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
				EC7
Akibat Tidak Langsung	Akibat Tidak Langsung	EC8	Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur serta kasa yang diberikan kepada publik secara komersial, dalam bentuk natura, atau pro bono.	
		EC9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.	
		Kinerja Lingkungan	Material	EN1
EN2	Persentase penggunaan bahan daur ulang			
Energi	EN3			Penggunaan energi langsung dari sumber daya energi primer
	EN4			Penggunaan energi tidak langsung berdasarkan sumber primer
	EN5			Penghematan energi melalui konversi dan peningkatan efisiensi.
EN6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbaharui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.			
EN7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.			
Air	Air	EN8	Total pengambilan air per sumber.	
		EN9	Sumber air terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.	
		EN10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			dan di daur ulang.	
<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)	EN11	Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah – daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati di luar daerah yang diproteksi.	
		EN12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi).	
		EN13	Perlindungan dan pemulihan habitat.	
		EN14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.	
		EN15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat resiko kepunahan yang masuk dalam daftar merah IUCN (IUCN RedList Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah – daerah yang terkena dampak operasi.	
	Emisi, Efluen dan Limbah	EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat.	
		EN17	Emmisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat	
		EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.	
		EN19	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depletig substances/ODS) diperinci berdasarkan berat.	
		EN20	NOx, Sox dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat.	
		EN21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.	
		EN22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.	
		EN23	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.	
		EN24	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.	
		EN25	Identitas, ukuran, status proteksi, dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.	
	Produk dan Jasa	EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.	
		EN27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.	
	Kepatuhan	EN28	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.	
	Pengangkutan / Transportasi	EN29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.	
	Menyeluruh	EN30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	
	Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak	Pekerjaan	LA1	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah dipecah berdasarkan jenis kelamin.
			LA2	Jumlah dan tingkat memperkerjakan karyawan baru dan perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		LA3	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut lokasi signifikan operasinya.	
<b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Tenaga kerja /Hubungan Manajemen	LA4	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.	
		LA5	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.	
	Kesehatan dan Keselamatan Jabatan	LA6	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.	
		LA7	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah dan jenis kelamin.	
		LA8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.	
		LA9	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.	
	Pelatihan dan Pendidikan	LA10	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan dan jenis kelamin.	
		LA11	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menjangkau kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.	
		LA12	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur dan menurut jenis kelamin.	
	Keberagaman dan Kesempatan Setara	LA13	Komposisi badan pengelola/pengusaha dan perincian karya-wan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok karyawan minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.	
	Remunerasi setara untuk wanita dan pria	LA14	Rasio gaji pokok dan tunjangan bagi perempuan dan laki – laki berdasarkan kategori karyawan dan lokasi signifikan operasi.	
	Hak Asasi Manusia	Praktek Investasi dan Pengadaan	HR1	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
			HR2	Persentase pemasok dan kontraktor dan partner bisnis lainnya yang signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM.
			HR3	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.
	Nondiskriminasi	HR4	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.	
	Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul	HR5	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.	
	Pekerja Anak	HR6	Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.	
	Kerja Paksa dan Kerja Tertib	HR7	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.	
	Praktek / Tindakan Pengamanan	HR8	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi.	
	Hak Penduduk Asli	HR9	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.	
C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Masyarakat / Sosial	SO1	Persentase operasi dengan mengimplementasikan keterlibatan komunitas lokal, dampak penilaian dan program pembangunan.	
	Korupsi	SO2	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.	
		SO3	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.	
		SO4	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.	
	Kebijakan Publik	SO5	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.	
		SO6	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.	
	Kelakuan Tidak Bersaing	SO7	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.	
	Kepatuhan	SO8	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.	
	Tanggung Jawab Produk	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	PR1	Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut.
			PR2	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
	Pemasangan Label bagi produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.	
		PR4	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.	
		PR5	Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.	
	Komunikasi Pemasaran	PR6	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.	
		PR7	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.	
	Keleluasaan Pribadi Pelanggan	PR8	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.	
	Kepatuhan	PR9	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.	

Sumber : *Global Reporting Initiative*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 8. Nilai Perusahaan

Menurut Wahidawati (2005) tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai perusahaan dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, dikarenakan harga saham dapat mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki.

Nurlela dan Islahuddin (2008), mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara maksimal apabila harga saham meningkat. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula keuntungan para pemegang saham sehingga keadaan ini diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang meningkat, menyebabkan nilai perusahaan juga meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimal apabila para pemegang saham memberikan tugas pengelolaan perusahaan kepada orang – orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris.

Investor menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui nilai pasar perusahaan serta mengetahui kinerja perusahaan dimasa lampau dan bagaimana prospeknya di masa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya adalah Tobin's Q. Menurut Sukamulja (dalam Evelina dan Juniarti 2014) rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan, dengan memasukkan seluruh aset perusahaan berarti fokus perusahaan tidak hanya kepada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan bukan hanya berasal dari ekuitas saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan kreditur. Semakin besar nilai Tobin's Q maka perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk memiliki perusahaan tersebut.

**9 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**9 Kinerja Keuangan Perusahaan**

Menurut Mulyadi (2001) kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada suatu standar yang telah ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya dapat diukur dan dapat pula menggambarkan kondisi suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati.

Kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kinerja non keuangan (*non financial performance*) dan kinerja keuangan (*financial performance*). Kinerja keuangan adalah hasil penilaian terhadap kemampuan perusahaan, baik dari aspek likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas yang dibuat oleh pihak – pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Kinerja keuangan dipakai oleh manajemen sebagai salah satu pedoman untuk mengelola sumber daya yang ada. Kinerja keuangan merefleksikan kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan laporan keuangan. Laporan dari kinerja keuangan dibuat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi masa lalu perusahaan dan dijadikan sebagai alat untuk memprediksi di masa yang akan datang.

Salah satu cara mengukur kinerja keuangan yaitu dengan penilaian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan atau kinerja perusahaan. Secara umum rasio keuangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Rasio Profitabilitas/Rentabilitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Rasio ini antara lain: GPM (*Gross Profit Margin*), OPM (*Operating Profit Margin*), NPM (*Net Profit Margin*), ROA (*Return to Total Asset*), dan ROE (*Return on Equity*).
- Rasio Likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban – kewajiban lancarnya. Rasio ini antara lain: Rasio Kas (*cash ratio*), Rasio Cepat (*quick ratio*), Rasio Lancar (*current ratio*).
- Rasio Pengungkit/Solvabilitas/*Leverage*. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana perusahaan. Beberapa rasio ini antara lain: Rasio Total Hutang terhadap Modal sendiri, Total Hutang terhadap Total Asset, TIE (*Time Interest Earned*).
- Rasio Aktivitas. Rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen dalam menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu faktor penting yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Selain itu terkait dalam pemberian pinjaman kepada perusahaan, profitabilitas menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kreditor. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan mendorong para manager untuk memberikan informasi yang lebih rinci

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





sehingga dapat meyakinkan investor dan kreditor terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Devi dan Amran (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profit besar harus aktif dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas yang tinggi, akan memberikan kesempatan yang lebih kepada manajemen dalam mengungkapkan serta melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Bowman dan Haire (dalam Laksmi dan Purwanto 2013), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan tercermin dalam pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan suatu gaya manajerial untuk membuat perusahaan memperoleh keuntungan. Ketika tanggung jawab agen terhadap prinsipal telah terpenuhi maka akan memberikan peluang bagi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### b. Likuiditas

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya perusahaan diharuskan memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajiban finansialnya. Menurut Kamus Keuangan, likuiditas digunakan untuk menunjukkan nilai kekayaan lancar untuk menutupi hutang lancar yang ada. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk segera melunasi hutang-hutang jangka pendeknya.

Secara finansial, perusahaan yang memiliki kemampuan finansial yang kuat cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang kemampuan finansialnya lemah karena perusahaan

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang memiliki rasio likuiditas tinggi akan diminati oleh para investor (Permata 2013).

Terdapat dua indikator yang sering digunakan untuk mengukur rasio likuiditas, yaitu *current ratio* dan *quick ratio*. Rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio yang paling sering digunakan. Rasio lancar mengukur kemampuan aktiva lancar membayar hutang lancar, sedangkan rasio cepat (*quick ratio*) mengukur kemampuan yang sesungguhnya untuk memenuhi hutang - hutangnya tepat pada saatnya.

### c. Solvabilitas

Menurut Kamus Keuangan, solvabilitas merupakan suatu ukuran yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk menutupi hutang - hutangnya baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Kamil dan Herusetya (2012) bagi para kreditur laporan tentang solvabilitas diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak - hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan dengan rasio solvabilitas yang rendah. Hal ini didukung dengan teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) yang memprediksi perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka akan mengungkapkan lebih banyak informasi dikarenakan biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 10. Tata Kelola Perusahaan

### a. Pengertian

Menurut *Cadbury Committee, Good Corporate Governance* adalah suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar memperoleh keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung-jawabannya kepada para pemegang saham khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)*, GCG didefinisikan sebagai suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai :

“Suatu proses dan prosedur berdasarkan pada organisasi yang diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan menentukan hak dan tanggung jawab diantara anggota-anggota yang berbeda di dalam organisasi seperti dewan pengurus, manajer, shareholders dan stakeholders dan menetapkan peraturan untuk pengambilan keputusan.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan dengan tetap memberikan perhatian kepada para *stakeholder*. Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

### b. Asas *Good Corporate Governance*

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG (2006) asas – asas yang harus diterapkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



setiap perusahaan adalah antara lain sebagai berikut :

(1) *Transparansi (Transparency)*

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain itu perusahaan juga harus dapat mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan secara jelas dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dan memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi.

(3) *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan memperoleh pengakuan *good corporate citizen*.

(4) *Independensi (Independency)*

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga organ perusahaan tidak saling mendominasi dan terpengaruh oleh kepentingan tertentu sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan dan memperlakukan secara setara dan wajar pada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**c. Manfaat *Good Corporate Governance***

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik, antara lain:

- (1) Peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik.
- (2) Perolehan dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- (3) Pengembalian kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- (4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden.

**d. Mekanisme *Good Corporate Governance***

**(1) Kepemilikan Institusional**

Struktur kepemilikan yang cukup besar di dalam sebuah perusahaan salah satunya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menurut Djakman dan Machmud (dalam Kristi 2013) merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan *asset management*.

Sebagian besar saham perusahaan pertambangan dimiliki oleh institusi. Sebagai pemegang saham terbesar maka kehadiran institusi di dalam suatu perusahaan dijadikan sebagai sarana untuk memonitor manajemen. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya dengan transparan kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan meningkatkan nilai perusahaan dengan mekanisme pasar modal sehingga dapat mempengaruhi harga saham. Turban dan Greening menyatakan bahwa investor institusional melihat adanya keuntungan jangka panjang dari keterlibatan perusahaan dalam *corporate social performance*. *Corporate social performance* berpengaruh secara positif terhadap reputasi dan daya tarik perusahaan terhadap para pekerja dan pelamar kerja.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

## (2) Kepemilikan Manajerial

Wirawan dan Sukirno (2013) mendefinisikan kepemilikan manajemen sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajemen di dalam sebuah perusahaan dapat menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Dengan komposisi kepemilikan manajemen yang besar maka akan semakin efektif memonitoring aktivitas perusahaan.

Ketika kepemilikan saham manajemen rendah maka timbul kecenderungan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer yang akan meningkat juga (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan manajemen di dalam perusahaan dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan yang terjadi diantara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan hilang apabila pihak manajemen juga sekaligus sebagai pemegang saham.

### (3) Independensi Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit bertugas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem audit di semua bagian perusahaan.

Pembentukan serta pedoman pelaksanaan kegiatan komite audit diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang dalam Peraturan Nomor IX.I.5. Menurut peraturan tersebut, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan dewan komisaris.

Keberadaan komite audit di Indonesia merupakan sebuah kewajiban, di dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh KNKG (2006) disebutkan bahwa : “Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit.”

Di dalam komite audit sekurang – kurangnya harus terdiri dari tiga orang anggota. Untuk menjadi anggota komite audit seorang individu haruslah memenuhi persyaratan kompetensi, independensi, dan reputasi yang selengkapnya diatur dalam Piagam Komite Audit. Forker (dalam Suhardjanto dan Permatasari 2010) menyatakan bahwa keberadaan komite audit dengan anggota independen yang lebih besar dapat meningkatkan kualitas kontrol yang nantinya mengarah pada kualitas pengungkapan yang lebih baik.

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.2**

NO.	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Hasyir (2009)	<b>Dependen:</b> Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan <b>Independen:</b> Tipe industri	Analisis Regresi	Pengungkapan pada perusahaan <i>high profile</i> lebih tinggi dibandingkan perusahaan <i>low profile</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





		( <i>high profile</i> dan <i>low profile</i> )		
2.	Murwaningsari (2009)	<b>Dependen:</b> Nilai Perusahaan <b>Independen:</b> Kepemilikan manajemen, Kepemilikan institusional, CSR	Analisis Regresi Berganda	CSR berhubungan positif dengan nilai perusahaan.
3.	Said <i>et al.</i> (2009)	<b>Dependen:</b> Pengungkapan CSR <b>Independen:</b> Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Duality, Independensi Komite Audit, Sepuluh Pemegang Saham Terbesar, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah	Analisis Regresi Berganda	Kepemilikan Pemerintah dan Independensi Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
4.	Zurkhin (2010)	<b>Dependen:</b> Pengungkapan CSR <b>Independen:</b> Kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, Profitabilitas	Analisis Regresi Berganda	Dewan Komisaris Independen dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5.	Rawi dan Muchlish (2010)	<b>Dependen:</b> Pengungkapan CSR <b>Independen:</b> Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusi, <i>Leverage</i> , Total Aset, Nilai Pasar, Perubahan Return, Umur Perusahaan	Analisis Regresi Berganda	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
6.	Rustiarini (2010)	<b>Dependen:</b> Nilai Perusahaan <b>Independen:</b> CSR, D, GCG	Analisis Regresi	Pengungkapan CSR dan pengungkapan <i>corporate governance</i> berpengaruh pada nilai perusahaan.
7.	Fajarini (2012)	<b>Dependen:</b> Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan <b>Independen:</b> Biaya Politis, <i>Leverage</i> , ROE	Analisis Regresi Berganda	Biaya Politis berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan pertanggungjawaban

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				sosial. ROE berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
	8. Kamil dan Herusetya (2012)	<b>Dependen:</b> Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan <b>Independen:</b> Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas	Analisis Regresi Berganda	Profitabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
	9. Khoyum (2012)	<b>Dependen:</b> Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan <b>Independen:</b> Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, Leverage	Analisis Regresi Berganda	Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan Leverage secara simultan berpengaruh pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi secara parsial, variabel solvabilitas tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan sosial perusahaan
	10. Kristi (2013)	<b>Dependen:</b> Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan <b>Kontrol :</b> Kepemilikan Saham oleh Institusi <b>Independen:</b> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Saham oleh Publik, Media Exposure	Analisis Regresi Berganda	Ukuran Perusahaan dan Media Exposure berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik dan Institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

#### Perusahaan

Menurut Belkaoui dan Karpik (dalam Lawer dan Andreas 2011) hubungan antara kinerja keuangan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, paling baik apabila diekspresikan dengan profitabilitas. Hal ini karena adanya pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diinginkan untuk membuat perusahaan memperoleh laba.

Menurut Raharjaputra (dalam Sari 2012) dengan menggunakan rasio profitabilitas dapat diukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan, baik dalam bentuk laba perusahaan maupun peningkatan nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih maupun modal sendiri.

Terdapat tiga rasio yang dapat digunakan dalam profitabilitas, yaitu rasio profit margin, return on asset (ROA), dan return on equity (ROE). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih detail sehingga dapat meyakinkan investor dan kreditor terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2010) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

### 2. Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

#### Perusahaan

Likuiditas menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar dengan liabilitas lancarnya. Likuiditas dijadikan sebagai suatu indikator untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil penelitian Syahrir dan Suhendra (2010) menemukan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil serupa diperoleh Khoyum (2012) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan yang lain bahwa mereka lebih baik daripada perusahaan lainnya dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Sinyal tersebut berupa pengungkapan yang lebih luas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan. Dengan demikian terdapat dugaan bahwa likuiditas entitas berhubungan positif dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

### 3. Pengaruh Solvabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dapat dibiayai dari hutang. Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila memiliki aset dan kekayaan yang cukup untuk menutup liabilitasnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Hasil penelitian Na'im dan Rakhman (dalam Kamil dan Herusetya 2012) menemukan bukti bahwa rasio solvabilitas mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang dengan menyediakan informasi yang lebih komprehensif. Untuk menghilangkan keraguan para pemegang saham maka diperlukan tambahan informasi berupa pengungkapan tanggung jawab sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki peluang untuk tetap bertahan.

#### 4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh sebuah institusi seperti asuransi, lembaga, koperasi, dana pensiun, dan lain-lain. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (>5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Arif dalam Nurkhin 2010).

Hasil penelitian Yuliana *et al.* (2008) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut konsisten dengan teori legitimasi yang mengasumsikan *stakeholders* sebagai penentu dalam eksistensi perusahaan sehingga semakin kuat posisi *stakeholders* maka semakin kuat pula perusahaan beradaptasi dengan keinginan mereka.

#### 5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Proporsi kepemilikan manajerial yang besar di dalam perusahaan akan mendorong pihak manajemen untuk berusaha lebih giat mengusahakan kepentingannya sendiri. Salah satu caranya yaitu dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor dalam meningkatkan citra perusahaan, semakin baik citra perusahaan maka diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba yang diperoleh juga semakin besar sehingga return pemegang saham pun akan semakin besar (Dwijayanti *et al.* 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Rawi dan Muchlish (2010) menemukan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

## 6. Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Wardianto *et al.* (2012) menyatakan bahwa komite audit dapat dijadikan alat yang efektif untuk melakukan pengawasan, sehingga dapat mengurangi *agency cost* dan meningkatkan kualitas pengungkapan. Said *et al.* (2009) menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan di Malaysia.

## 7. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Selain memperoleh laba yang melimpah, tujuan utama perusahaan lainnya adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, karena konsep keberlanjutan tersebut berkaitan dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keseimbangan diantara kepentingan – kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dengan adanya praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang baik maka diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor (Nurlela dan Islahuddin 2008).

Hackston dan Milne (dalam Anggraini 2006) menyatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen akan mengungkapkan informasi lebih mengenai pertanggungjawaban sosial karena hal tersebut dapat meningkatkan *image* perusahaan. Jadi, semakin banyak informasi sosial dan lingkungan yang diungkapkan oleh suatu perusahaan maka investor akan cenderung berinvestasi kepada perusahaan tersebut sehingga berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuhroh dan Sukmawati (dalam Titisari *et al.* 2010) diketahui bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan go publik terbukti berpengaruh terhadap volume perdagangan saham bagi perusahaan yang masuk kategori *high profile*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor merespon dengan baik informasi – informasi sosial yang disajikan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan. Semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan ternyata memberikan pengaruh terhadap volume perdagangan saham perusahaan dimana terjadi lonjakan perdagangan pada seputar publikasi laporan tahunan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

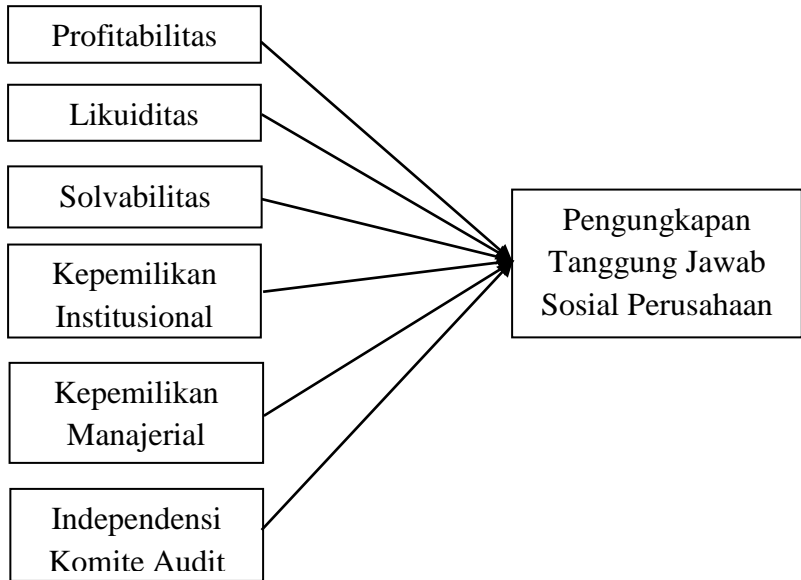
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

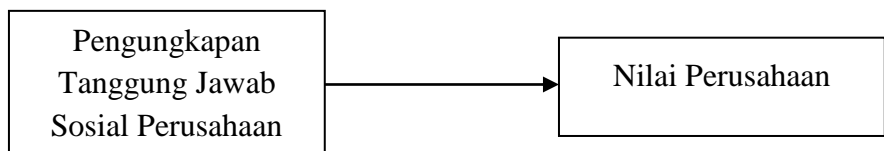
**Gambar 2.1**

Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.2**

Kerangka Pemikiran



**Model I**  
**© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Model II**  
**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**







## D. Hipotesis Penelitian

- H<sub>0</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- H<sub>a</sub> : Likuiditas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- H<sub>0</sub> : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- H<sub>a</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- H<sub>0</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- H<sub>a</sub> : Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- H<sub>0</sub> : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.